

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LANTANG KECAMATAN POL-SEL
KABUPATEN TAKALAR)**

ADHAYANTI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
Adhayantianti14@gmail.com

ABSTRAK

Adhayanti. 2020. Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak . Muhammad Akbal dan Imam Suyitno. 76 Halaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Khususnya pasal 42 dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar, (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Khususnya pasal 42 dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 khususnya pasal 42 dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar telah terlaksana, ini terbukti dengan adanya berbagai program pendidikan dan pelatihan petani yang diadakan di desa Lantang, diantaranya Program tani Appalili, Studi Lapang (SL), Studi Kelompok tani, Pelatihan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), dan kunjungan penyuluhan tani tiap dusun. (ii). Faktor pendukung terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang diantaranya faktor dukungan dari pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, dan dukungan dari pihak dinas pertanian Kabupaten Takalar, faktor ketersediaan tenaga penyuluh pertanian yang terdapat ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan petani diantaranya faktor terbatasnya jumlah tenaga Penyuluh Pertanian setiap desa yakni hanya satu orang sementara beban kerja PPL Desa cukup banyak, dan masih banyaknya petani yang malas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan petani yang diadakan.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini pembukaan undang-undang dasar 1945 telah memberikan tanggungjawab kepada negara salah satunya adalah tanggungjawab memajukan kesejahteraan umum dan Pancasila sila kelima secara jelas menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa. Negara memiliki tanggungjawab mensejahterakan rakyat dan setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Menurut pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.¹ Oleh karena itu untuk mencapai sebuah kesejahteraan maka setiap orang harus diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri dan usaha yang dilakukannya, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya di bidang Pertanian.²

Pemerintah Indonesia telah melakukan Berbagai upaya pembangunan di segala bidang seperti pendidikan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, infrastruktur, dan sebagainya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu pembangunan yang akan sangat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan ekonomi.

Kekuatan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur penting kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sebuah negara.

Ekonomi berbasis pada sektor pertanian di Indonesia telah memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia dihasilkan dari usaha yang dilakukan disektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah penduduk berakibat pula pada meningkatnya jumlah kebutuhan akan pangan.

Para pelaku usaha pertanian atau petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu juga dengan masyarakat Indonesia secara umum sangat bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa produk pertanian sangat berperan penting dalam kehidupan di negeri ini. Pertanian di Indonesia selain di upayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sendiri juga diharapkan mampu menghasilkan hasil pertanian yang dapat di ekspor kenegara lain sehingga dapat memberikan pemasukan bagi negara Indonesia yang akan diperuntukkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Dewasa ini, kebanyakan ekonom pembangunan menganut konsensus bersama bahwa sektor pertanian tidak lagi memainkan peranan pasif dan pendukung belaka dalam proses pembangunan ekonomi, justru perekonomian pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian khususnya harus memainkan peranan penting dalam strategi pembangunan ekonomi apapun, terutama bagi negara-negara berkembang berpendapatan ekonomi rendah.³

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian dan perekonomian, Petani mempunyai peran

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

³ Michael P.Todaro. Stephen C. Smith. 2011. *"Pembangunan Ekonomi"*. Penerbit Erlangga. hal 2

sentral dan kontribusi besar. Selama ini petani telah memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan ekonomi pedesaan. pada masyarakat pedesaan pada umumnya sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa di Indonesia. Meskipun pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang hasilnya tidak menentu dan tidak dapat di pastikan sebab sangat bergantung dengan kondisi alam dan cuaca tetapi sebagian besar masyarakat pedesaan pada umumnya sangat bergantung pada usaha pertanian yang dilakukan.

Sektor pertanian di Indonesia kini telah mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan utamanya perubahan pada kebiasaan sebagian besar petani yang dulunya sangat bergantung pada tenaga manusia dalam hal ini para petani yang sekarang telah mengalami sebuah perkembangan dengan hadirnya alat-alat canggih yang dapat di gunakan untuk mengolah lahan, menanam lahan, sampai pada memanen. Contohnya saja pada petani padi yang dulunya menggarap lahan dengan cangkul atau dengan menggunakan tenaga Sapi atau Kerbau namun kini telah hadir traktor/mobil pengolah lahan, yang dulunya menanam padi dengan tangan kini telah hadir alat penanam padi, dan memanen padi yang dulunya memotong menggunakan sabit kini telah mulai tergantikan dengan mobil pemotong padi. perkembangan tersebut bukanlah suatu hal yang dapat menjamin kesejahteraan para petani namun sedikit lebih memudahkan petani dalam bekerja. Pada kenyataannya belum semua petani dapat menikmati teknologi canggih tersebut, hal ini disebabkan karena belum meratanya peredaran alat-alat canggih tersebut, ketidakmampuan petani mengakses/memiliki alat-alat tersebut, juga karena ketidakmampuan sebagian petani dalam menjalankan alat tersebut.

Selain Resiko kegagalan panen yang seringkali dihadapi oleh petani, terdapat beberapa masalah yang dihadapi

para petani yang mengakibatkan kurang sejahteranya petani di Indonesia yaitu: a) Tingginya harga kebutuhan pokok pertanian dan sarana pertanian seperti bibit, pupuk, racun, alat-alat mesin pertanian, b) Rendahnya harga jual produk dan hasil pertanian, c) Transportasi dan distribusi hasil panen pertanian, d) Rendahnya kualitas SDM para petani, yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi para petani, e) Kurangnya sarana teknologi yang yang dapat diakses yang dapat mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil produk pertanian, f) Semakin menyempitnya lahan garapan, g) Kurang dan terbatasnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usaha petani dalam mengolah lahan pertanian.

Rendahnya kualitas SDM para petani, yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi para petani. Maka diperlukan upaya sadar dan terstruktur dari pihak pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait sektor pertanian untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani. Tingkat Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani merupakan hal yang sangat penting. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani, maka petani akan sulit untuk mengembangkan usahanya.

Petani saja tidak punya kemampuan yang cukup untuk memperbaiki usaha taninya sendiri. Bantuan dari luar sangat dibutuhkan oleh petani dalam memperbaiki dan meningkatkan hasil taninya. Banyaknya resiko pertanian dan permasalahan yang dihadapi petani maka diperlukan peran pemerintah yang dapat membantu petani dalam menghadapi resiko dan permasalahan yang harus dihadapi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada petani dari resiko pertanian yang sering terjadi, menjamin ketersediaan sarana

prasarana pertanian, mengembangkan mutu kemampuan dan keterampilan petani dalam mengembangkan usaha para petani disektor pertanian.

Berdasarkan uraian diatas calon peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya Pasal 42 (Pendidikan dan Pelatihan bagi petani), dengan mengangkat judul penelitian **“Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi berarti Pelaksanaan atau `penerapan. Istilah implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi selalu dimulai dari sebuah perencanaan yang akan menghasilkan sebuah sistem yang akan di laksanakan, dari proses pelaksanaan itulah yang disebut sebagai implementasi.

Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.⁴ implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁶

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.⁷

Ripley dan Franklin dalam Winarno menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh para aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁸ Kebijakan (Hogerwerf, 1983) adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu, dan dalam urutan waktu tertentu.⁹

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, pada berbagai dimensi kehidupan publik.¹⁰

⁴ Akib Haedar Dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca Volume 1. hal.117

⁵ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. hal.70

⁶ Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. hal.21

⁷ Teori implementasi kebijakan publik. akses 10 Juli 2019 .<http://rintosusantotempirai.blogspot.com>.

⁸ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. second edition. the Dorsey Press, Chicago-Illionis. hal 148

⁹ Prof. Dr. H. Faried SH, MS, & Dr. H Andi Syamsu Alam, M.Si. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama. hal. 15

¹⁰ ibid

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan sesuai dengan aturan, perintah, keputusan yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pula. Dengan kata lain implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, perwujudan, dan tindakan konkrit dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan merupakan suatu langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk menata atau mengatur kehidupan masyarakat diberbagai bidang kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. sehingga implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau penerapan dari sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah. implementasi dan kebijakan adalah hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan sebab dari setiap kebijakan selalu ada implementasi yang mengikutinya, keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan dari bagaimana pengimplementasiannya. Suatu kebijakan dirumuskan untuk menciptakan keteraturan dalam proses interaksi dan bereaksi antara anggota masyarakat maupun dengan lingkungannya terhadap salah satu bidang kegiatan.

b. Tingkatan Jangkauan Fungsi pengaturan Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik harus memiliki arah/tujuan dan fungsi yang jelas. Kebijakan publik yang dirumuskan memiliki tingkatan jangkauan fungsi pengaturannya. Pertama, kebijakan publik jangkauan fungsi pengaturannya seluruh aspek kehidupan bangsa, negara dan masyarakat. Kedua, jangkauan fungsi pengaturan dimana hanya sebagian dari pada aspek kehidupan bangsa, negara dan masyarakat. Ketiga, yaitu jangkauan fungsi pengaturannya hanya meliputi satu

jenis aspek kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat.¹¹

“Wujud dari pada Kebijakan Publik yang fungsi pengaturannya seluruh aspek kehidupan bangsa adalah Undang-undang Dasar bagi negara yang bersangkutan dan pelaksanaan atau istilah lainnya implementasi dilakukan oleh seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintahan sehingga seluruh aktivitas negara, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam keberhasilannya.”¹²

“Selanjutnya kebijakan publik yang fungsi pengaturannya sebagian aktivitas bangsa, negara, pemerintah dan masyarakat wujudnya adalah berupa undang-undang tertentu yang memang fungsinya sebagai alat pengaturan sehingga menciptakan keteraturan sebagian aktivitas bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga aktivitas yang dilaksanakan tersebut senantiasa memberikan hasil sesuai dengan harapan yang diinginkan.”¹³

“Adapun kebijakan publik yang jangkauan fungsi pengaturannya hanya orientasi kepada salah satu jenis tugas atau aktivitas bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat wujudnya adalah peraturan pemerintah yang hanya

¹¹ Prof Dr. H. Makmur, M.Si. & Dr. H. Rohana Thahier, M.Pd. 2016. Cetakan ke-1. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 35

¹² ibid

¹³ ibid

mengatur salah satu jenis kegiatan.”¹⁴

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu wujud kebijakan publik yang fungsi pengaturannya sebagian aktivitas bangsa, negara, pemerintah dan masyarakat. dimana undang-undang nomor 19 tahun 2013 mengatur secara khusus aktivitas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dikehendaki yang salah satu tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi petani. Kebijakan sebagai sebuah pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk di lakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak, dalam aktualisasinya di rumuskan kedalam bentuk aturan perundang-undangan.¹⁵

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, tidak ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, serta perilaku sasaran.¹⁶ Selain itu ada 4 faktor yang saling berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan yaitu: Isi Kebijakan, Political will, karakteristik kelompok sasaran, dan dukungan lingkungan.¹⁷

Menurut Van metter dan Carl E. Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi,

karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi lingkungan sosial.¹⁸

- a) Standar dan sasaran kebijakan: Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Agar suatu kebijakan tidak bersifat bias dan tidak menimbulkan interpretasi yang multi tafsir.
- b) Sumberdaya: implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia, sumber daya berupa materi, dan sumber daya metoda.
- c) Hubungan antar organisasi: diperlukan kordinasi dan kerjasama antar instansi pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d) Karakteristik agen pelaksana: dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi , semua hal itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
- e) Disposisi implementor: dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan , dan intens disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
- f) Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi: mencakup kondisi lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan, ketersediaan sumber daya ekonomi, dan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan

¹⁴ ibid

¹⁵ Faried Ali . loc.it. p.33

¹⁶ Dr. Suharno, M.Si. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak (anggota IKAPI). hal. 169

¹⁷ Faried Ali, loc.it, p.23

¹⁸ Model dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Akses. 20 juli 2019. <http://www.google.com.amp/s/arpsansiregar.wordpress.com>.

dukungan bagi implementasi suatu kebijakan.

2. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

a. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah upaya untuk menghindarkan seseorang dari segala ancaman yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif. Perlindungan merupakan suatu bentuk pemberian rasa aman dan nyaman.

Upaya perlindungan yang dilakukan negara terhadap warga negara disebut sebagai upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.

Perlindungan hukum bagi petani dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap petani dalam menghadapi berbagai resiko pertanian yang dihadapi petani.

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya. Setiap upaya perlindungan diberbagai bidang yang dilakukan negara terhadap warga negara selalu ditegaskan dalam aturan hukum. Salah satunya adalah upaya perlindungan terhadap petani, yang diatur didalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Salah satu upaya perlindungan terhadap petani yakni perlindungan petani dari resiko pertanian yang dapat terjadi yang diakibatkan karena keterbatasan sarana prasarana pertanian sehingga hasil dari produksi pertanian tidak maksimal. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan dengan cara memastikan ketersediaan sarana prasarana pertanian.

b. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan daya guna sesuatu. Pemberdayaan merujuk pada aktifitas pengelolaan untuk mencapai pengembangan dan peningkatan.

Pemberdayaan memiliki banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh.

Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya yang dimiliki, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁹ Sedangkan menurut Ife dalam Suharto, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.²⁰

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²¹

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok Rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²²

¹⁹ Ginandjar Kartasasmitha. 1996. *"Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan"*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo. 1996 hal 145.

²⁰ Edi Suharto, Ph.D, 2017. *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat"*. Bandung: PT Refika Aditama. hal 58

²¹ Dr. Zubadi, M.Ag, M.Pd. 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik*. Jakarta:

Prenadamedia Group. hal 24

²² ibid

Pemberdayaan sebagai sebuah proses atau langkah yang ditempuh untuk melakukan perubahan-perubahan yang terencana, seperti yang dirinci oleh Lippit dan Riant dalam Mardikanto, yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyadaran masyarakat, yaitu sebuah kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberlangsungan mereka yang bukan hanya sebagai makhluk individu dan anggota masyarakat, namun juga kapasitas dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga mereka mempunyai pemikiran yang lebih jauh bagaimana dampak yang akan dihadapi mereka ketika sebuah permasalahan itu terus berlangsung.²³
- 2) Menunjukkan adanya masalah yang dialami oleh masyarakat. Proses ini merupakan langkah yang bersamaan dengan langkah penyadaran masyarakat, dengan menunjukkan permasalahan yang sebenarnya sedang mereka alami. Permasalahan ini biasanya menyangkut pada sisi kelemahan petani salah satunya pada sumber daya manusia yang lemah, dan minimnya pemaksimalan kekuatan yang mereka miliki.²⁴
- 3) Membantu pemecahan masalah. Belajar bersama masyarakat untuk menganalisa permasalahan yang sedang mereka hadapi, langkah ini perlu dilakukan bersama mereka sehingga mereka juga akan belajar dalam memahami permasalahan mereka. Melakukan analisis akar masalah, alternatif solusi, serta pilihan alternatif paling mungkin.²⁵
- 4) Menunjukkan pentingnya perubahan, bahwa mereka perlu melakukan perubahan yang merupakan

keniscayaan yang harus mereka antisipasi. Perubahan yang mereka hadapi belum tentu kearah yang baik, namun jika sebuah permasalahan sosial itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami ketidakberdayaan.²⁶

- 5) Melakukan pengujian dan demonstrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas pemberdayaan paling bermanfaat yang beresiko terkecil. Sebuah pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik mereka dalam melakukan perubahan kecil yang bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi mereka.²⁷
- 6) Pemberdayaan Sebagai Sebuah Proses yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang baik individu maupun kelompok, yang diharapkan mampu mengubah pola pemikiran maupun perilaku suatu individu atau kelompok kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan terhadap petani merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan pertanian. dengan pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh petani sehingga memiliki kemampuan yang maksimal dalam melakukan usaha tani dan mampu menghasilkan hasil pertanian yang maksimal pula. Upaya pemberdayaan terhadap petani salah satunya dilakukan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan bagi petani yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki petani.

c. Pengertian Petani

Petani adalah orang yang mengusahakan atau mengelola usaha

²³ Totok Mardikanto, dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. hal. 123

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

²⁷ ibid

pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Petani yang umum dikenal ialah orang yang pekerjaannya mengelolah suatu lahan dengan menanam satu jenis atau berbagai jenis tanaman untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani yang mengelolah suatu lahan tertentu tidaklah mutlak bahwa lahan yang dikelolanya adalah lahan miliknya sendiri. sebagaimana yang dikemukakan Irmayanti (dalam Pane, 2014) tentang klasifikasi petani:

- 1) Petani Pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani itu sendiri.
- 2) Petani Penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai.
- 3) Petani Penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, resiko ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah, biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, serta peraturan negara yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan pengklasifikasian petani di atas sesuai

dengan hasil pengamatan awal calon peneliti maka disimpulkan bahwa mayoritas petani di Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar adalah petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik merupakan petani yang memiliki tanah pribadi dan secara langsung mengelola lahannya sendiri. Kemudian petani penggarap yaitu seseorang yang menjalankan usaha taninya dengan pinjaman tanah orang lain, dan terdapat sistem bagi hasil dengan pemilik tanah. Biasanya sistem bagi hasil ini atas kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.

d. Konsep Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013

Hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat hadir untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dasar hukum atau tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Setiap produk hukum yang hadir harus berlandaskan atas nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Seperti halnya dengan hukum yang mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani. Hukum tersebut hadir untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat petani seperti halnya profesi lain yang diberikan jaminan oleh hukum, dan dalam pengimplementasiannya harus mengedepankan nilai keadilan bagi semua petani. Selain itu aturan tersebut memiliki kegunaan yang jelas yakni untuk memberikan perlindungan hukum bagi petani dan memberikan upaya pemberdayaan kepada petani sehingga petani mampu mencapai kesejahteraan.

Sebelum disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur pelaku usaha khususnya di bidang pertanian masih bersifat parsial dan hanya mengatur

kepentingan subsektor²⁸ serta belum ada aturan yang jelas yang memberikan jaminan perlindungan dalam menghadapi berbagai resiko pertanian dan pemberdayaan dalam mengembangkan usaha para petani. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Budidaya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Internasional mengenai Sumberdaya Genetik untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources for food and agriculture*), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura

Peraturan perundang-undangan tersebut belum ada yang memberikan jaminan perlindungan yang jelas bagi para petani dalam menjalankan usahanya di sektor pertanian. sehingga hadir Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani sebagai upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan para petani.

Konsep perlindungan petani menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun

2013 Pasal 1 ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dari definisi tersebut mengandung 2 unsur yaitu: a) Segala upaya untuk membantu petani, b) dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Sedangkan konsep pemberdayaan petani menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2)

“Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.”

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu: a) segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani, b) untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, c) melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Sebagai suatu aturan yang hadir untuk mengatur, tentunya memiliki tujuan yang jelas, adapun tujuan dari Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut pasal 3 UU No. 19 Tahun 2013

²⁸ berkas.dpr.go.id > LampiranPDF naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. diakses 25 Desember 2019.

yaitu untuk: a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani, c) memberikan kepastian Usaha Tani, d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan, f) menumbuhkan kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2013, telah diatur bentuk strategi yang dilakukan dalam perlindungan dan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan. Adapun strategi perlindungan petani menurut pasal 7 ayat (2), perlindungan dilakukan melalui:

a) prasarana dan sarana produksi Pertanian, b) kepastian usaha, c) harga Komoditas Pertanian, d) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, d) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, e) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, f) Asuransi Pertanian

Sedangkan Strategi Pemberdayaan menurut pasal 7 ayat (3), pemberdayaan dilakukan melalui: a) pendidikan dan pelatihan, b) penyuluhan dan pendampingan, c) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, d) konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, e) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, f) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, g) penguatan Kelembagaan Petani.

Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani merupakan hal penentu dari keberhasilan usaha para petani. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani maka petani akan sulit mengembangkan

usahanya. Dalam pemberdayaan petani, salah satu strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan petani adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petani. Pendidikan dan pelatihan kepada petani dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petani dalam melakukan usaha pertanian.

Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada petani diatur secara khusus dalam Pasal 42.

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan, b) Pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian, c) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan penegetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani dalam bekerja di sektor pertanian.

3. Tinjauan Tentang Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “Catera” yang berarti (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.²⁹ Secara umum, istilah kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar

²⁹ Adi Fahrudin, Ph.D .2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. cetakan kedua. hal 8

seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.³⁰

Sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, nyaman, dan makmur. Dengan kata lain terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kenyamanan, dan segala kebutuhan hidup yang diperlukan. Kebutuhan hidup setiap manusia diantaranya mencakup kebutuhan akan makanan/minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kesejahteraan juga selalu dikaitkan dengan kualitas hidup (*quality of life*).³¹ Konsep kualitas hidup selalu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kehidupan yang baik.

Salah satu hal penting dalam mencapai kesejahteraan adalah pendapatan, sebab pendapatan yang akan menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan seseorang bergantung pada pekerjaan yang diusahakannya. Oleh karena itu, dalam hal ini ketersediaan lapangan pekerjaan sangat menentukan. Keseimbangan yang stabil antara jumlah manusia dengan jenis atau lapangan pekerjaan akan melahirkan kesejahteraan dan kedamaian manusia.³²

Seorang petani yang mata pencaharian pokoknya adalah bertani tentunya tingkat kesejahteraannya sangat dipengaruhi dari pendapatannya. Dengan kata lain hasil dari usaha pertanian yang dilakukan yang menentukan apakah pendapatannya tinggi atau rendah, sehingga petani mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya atau tidak.

b. Tolak Ukur Kesejahteraan Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk memantau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas mengambil

informasi keadaan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan. Dari informasi tersebut terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Delapan indikator keluarga sejahtera menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 yaitu:

a). Pendapatan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. pendapatan adalah jumlah dari keseluruhan penerimaan sebuah rumah tangga dari kegiatan ekonomi produksi dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan ketika petani lakukan aktivitas penjualan barang-barang hasil produksi di pasar. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka akan meningkatkan standar kehidupan petani karena dengan meningkatnya pendapatan maka akan merubah pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan maka akan meningkatkan konsumsi.

b). Pengeluaran

Pengeluaran adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengeluaran ini seperti pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk kesehatan, pengeluaran untuk pendidikan dan pengeluaran transportasi, dan pengeluaran lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu rumah tangga konsumsi. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan, kesehatan dan pendidikan merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga dalam kondisi apapun karena pengeluaran tersebut merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup yang menuju kepada usaha peningkatan-peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c). Keadaan tempat tinggal

³⁰ Edi Suharto. loc.it. p.3

³¹ Adi Fahrudin. op.cit. p.44

³² Prof. Dr. H. Makmur, M,Si. 2007. "Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi". Bandung: PT Refika Aditama, hal 152

Adapun Kriteria tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, keadaan ruangan, status kepemilikan rumah.

d). Fasilitas tempat tinggal

Adapun Fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 5 item, yaitu akses jalan, tempat pembuangan sampah, alat penerangan, sumber air bersih, fasilitas kamar mandi dan WC

e). Kesehatan anggota keluarga

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Perundang-undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat dan lengkap setiap aspek kesehatan. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi pada modal manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang bersamaan, pelayanan-pelayanan tersebut secara langsung mampu memuaskan konsumsi atas kebutuhan pokok.

f). Jenis pelayanan kesehatan

Adapun kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kemudahan yang terdiri dari 3 item yaitu, jenis layanan yang didapatkan, biaya berobat ke sarana kesehatan, sumber keuangan untuk akses kesehatan.

g). Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap warga, dan kemudahan warga negara untuk mengakses pendidikan dapat menjadi ukuran ataupun indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan warga negara. Adapun Kriteria kemudahan yang dimaksud memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 2 item yaitu jarak sekolah, biaya ke sekolah.

h). Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Adapun Kemudahan mendapatkan transportasi yang dimaksud adalah kemudahan yang terdiri atas 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan. menggunakan cara berinteraksi dengan cara partisipan yaitu subjek pemilik realitas yang akan diteliti yang bersifat dinamis.³³

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata.

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data yang bersumber langsung dari partisipan yang diperoleh baik dalam bentuk lisan maupun tulisan serta data yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lantang. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi untuk dapat menemukan gambaran terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi petani di Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar. Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mengetahui objek penelitian lebih mendalam dan secara langsung sehingga dapat menghasilkan data yang valid.

³³ Nusa putra, *Metode penelitian kualitatif pendidikan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013)

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yang tepat sangatlah penting untuk dapat menemukan data penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang hendak dilakukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Lantang Kecamatan Pol-sel Kabupaten Takalar. lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi awal peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat desa ini pekerjaan utamanya adalah sebagai petani.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan, didapatkan data mata pencaharian penduduk desa Lantang dari pihak sekretaris Desa Lantang bahwa dari jumlah keseluruhan Kartu keluarga 1170 dengan angka penduduk sebanyak 4085 jiwa, sebanyak 3829 Orang melakukan usaha tani, dan 256 Orang bekerja profesi lain.

Hampir di sepanjang jalan desa ini dapat dilihat lahan pertanian atau sawah yang terbentang luas. dalam setahun sebagian besar lahan pertanian itu bisa di tanami padi tiga kali, dan sebagian lahan yang agak jauh dari sumber air ditanami padi dua kali dalam setahun dan pada musim kemarau ditanami tanaman lain yang tidak terlalu banyak membutuhkan air dan jangka waktu panennya tidak terlalu lama seperti kacang hijau, kacang tanah, jagung, dan kedelai.

Melihat kondisi masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, hal inilah yang membuat calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan dan pemberdayaan petani dan memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian, yang difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para petani di desa ini.

A. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian.

1. Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Rumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian ini harus:

- a. Mencakup kegiatan yang dilakukan
 - b. Menuruti susunan yang tersistematika dan logis
 - c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
 - d. Memberikan hasil yang dicapai
- #### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Pengumpulan data
 - b. Pengolahan data
 - c. Analisis data
 - d. Penafsiran hasil penelitian
- #### 3. Tahap Hasil Laporan

Penulisan hasil laporan harus memperhatikan seperti keabsahan data, penggunaan tanda baca yang benar, bentuk dan isi laporan, serta penyusunan ketahap skripsi.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Petani di Desa Lantang

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 merupakan salah satu aturan yang mengatur terkait kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi petani. Implementasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 pada penelitian ini difokuskan pada petani sawah yang terdapat di desa Lantang Kec. Pol-Sel Kab. Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kegiatan pendidikan dan pelatihan petani diwujudkan melalui program Appalili, program sekolah lapangan, program pelatihan alsintan, program studi kelompok tani, dan program kunjungan tani ke setiap dusun.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Petani di Desa Lantang

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang yaitu, faktor ketersediaan tenaga penyuluh pertanian kabupaten/kecamatan/desa, dan faktor dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah desa Lantang, pemerintah kabupaten, dan dinas pertanian kabupaten Takalar.

Adapun yang menjadi factor penghambat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu : yang menjadi faktor penghambat diantaranya yaitu terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian Desa yaitu hanya satu orang setiap Desa sementara pekerjaan PPL Desa cukup banyak. dilapangan PPL Desa ini yang berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan petani khususnya di Desa Lantang, faktor kurangnya kesadaran petani dan malasnya petani mengikuti kegiatan yang diadakan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Petani Di Desa Lantang

Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada petani dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani sehingga mampu mengembangkan usaha tani yang dilakukan dan meningkatkan hasil produksinya.

Terdapat berbagai program yang diluncurkan pemerintah melalui dinas pertanian dalam hal memberdayakan petani utamanya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas pertanian Kabupaten Takalar. kegiatan Pendidikan dan pelatihan petani dikabupaten Takalar dilakukan melalui program bimbingan teknis (bimtek) penanaman dan perawatan berbagai jenis varietas tanaman. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan melalui program-program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian kabupaten, kecamatan dan desa.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan petani diwujudkan melalui program Appalili, program sekolah lapangan, program pelatihan alsintan, program studi kelompok tani, dan program kunjungan tani ke setiap dusun. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 42 terkait pemerintah dan pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani telah terlaksana, hal ini terbukti dengan adanya berbagai program-program yang diadakan yang berorientasi pada pendidikan dan pelatihan petani guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani serta memberikan bimbingan kepada petani dalam menjalankan usaha tani sehingga dapat mengembangkan usahanya dan dapat sejahtera dari hasil usaha yang dilakukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Petani di Desa Lantang

a. Faktor Pendukung

Program pendidikan dan pelatihan petani membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat terlaksana. Suatu program yang telah ditetapkan tidak akan dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan petani di Desa Lantang.

Yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang yaitu, faktor ketersediaan tenaga penyuluh pertanian kabupaten/kecamatan/desa, dan faktor dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah desa Lantang, pemerintah kabupaten, dan dinas pertanian kabupaten Takalar.

- Faktor ketersediaan tenaga penyuluh pertanian ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa juga tentunya menjadi hal penting dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan petani karena tenaga penyuluh ini merupakan orang yang berkompeten dalam bidang pertanian, tenaga penyuluh pertanian inilah yang akan memberikan suluhan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para petani.
 - Dukungan dan kerjasama yang baik dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa, bupati takalar, dan instansi Dinas pertanian, serta penyuluh pertanian dalam mengadakan kegiatan-kegiatan pertanian dan pemberdayaan petani sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan selalu direspon positif. Kepala desa Lantang juga selalu mendukung dan selalu aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan petani.
- b. Faktor penghambat

Diantara faktor pendukung yang ada, dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan juga tidak terlepas dari faktor penghambat. terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala

dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang.

Yang menjadi faktor penghambat diantaranya yaitu terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian Desa yaitu hanya satu orang setiap Desa sementara pekerjaan PPL Desa cukup banyak. dilapangan PPL Desa ini yang berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan petani khususnya di Desa Lantang, faktor kurangnya kesadaran petani dan malasnya petani mengikuti kegiatan yang diadakan.

- Terbatasnya jumlah tenaga Penyuluh pertanian Lapangan (PPL) Desa yakni hanya satu orang setiap desa sementara pekerjaan PPL Desa cukup banyak. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan PPL Desa seperti penginputan data kelompok tani, penyusunan RDKK, membantu dan mendampingi petani mengajukan bantuan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan kepihak dinas pertanian, melaporkan jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani di wilayah kerjanya setiap musim tanam. Sehingga berkurang waktu-waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pembinaan petani seperti pemberian pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- Masih adanya petani yang seringkali malas mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan, padahal yang dilakukan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan petani yang ada di desa Lantang. banyaknya petani yang malas mengikuti membuat pelaksanaan kegiatan ini tidak berjalan maksimal dan sesuai harapan untuk mengembangkan potensi dari semua petani yang ada di desa lantang dan meningkatkan hasil produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 42 terkait kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petani telah terlaksana. Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan petani di Desa Lantang diwujudkan melalui beberapa program seperti kegiatan Appalili, Sekolah Lapang, Bimbingan penggunaan Alsintan, Studi kelompok tani, dan kunjungan Tani tiap dusun.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan petani di desa lantang, yaitu adanya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan setiap Kecamatan dan setiap Desa, serta adanya dukungan baik dari pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Desa.
3. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan petani di desa Lantang diantaranya terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa yang hanya satu orang setiap Desa sementara tugas atau pekerjaan PPL Desa cukup banyak, sehingga waktu-waktu yang digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani menjadi terbatas, faktor masih terdapat banyak petani yang malas mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan.

SARAN

1. Untuk Petani agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan.
2. Pemerintah semestinya menambah tenaga penyuluh pertanian khususnya tenaga Penyuluh pertanian di setiap Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Fahrudin, Ph.D .2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. cetakan ke-2. Bandung: Refika Aditama.

Edi Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Faried Ali, & Syamsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: Refika Aditama.

Ginandjar K. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Pemerataan*. Jakarta: Pusaka Cisendo.

Makmur. 2007. *Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.

Makmur, & Rohana Thahier. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama.

Michael P.Todaro. & Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga.

Mohammad Ali. 2014. *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo

Purwanto, & Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta:Bumi Aksara.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak (anggota IKAPI)

Totok Mardikanto, dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Yanuar Ikbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Cetakan ke-2. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 131.

Jurnal/Internet

Akib Haedar, & Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca Volume 1.

Ripley, Rendal B. & Grace A. Franklin. 1986. "Policy Implementation and Bureaucracy". second edition. the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Berkas.dpr.go.id › LampiranPDF naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 25 Desember 2019

Model dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 20 juli 2019. <http://www.google.com.amp/s/arpansiregar.wordpress.com>.

Teori implementasi kebijakan publik. 10 Juli 2019. <http://rintosusantotempirai.blogspot.com>.